

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Dasar Hukum**

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Padamara Tahun 2021 ini disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021;
6. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Purbalingga;
7. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 104 Tahun 2020 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021.

## B. Visi Misi Kepala Daerah

Pembangunan daerah di Kabupaten Purbalingga yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun ke depan merupakan penjabaran dari Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga terpilih periode tahun 2021-2026. Visi Kabupaten Purbalingga adalah “**Purbalingga Yang Mandiri Dan Berdaya Saing Menuju Masyarakat Sejahtera Yang Berakhlak Mulia**”. Makna yang termuat dalam Visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

**Purbalingga yang Mandiri** adalah Purbalingga yang memiliki kemampuan mengatur dan mengurus kepentingan daerahnya menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakatnya. Termasuk di dalamnya adalah secara bertahap ketergantungan Purbalingga terhadap pihak-pihak lain semakin dapat dikurangi. Mewujudkan Purbalingga yang mandiri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari cita-cita mewujudkan Indonesia yang berdaulat dalam politik, berdikari dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam berkebudayaan. Berdaulat dalam bidang politik diwujudkan dalam pembangunan demokrasi politik yang berdasarkan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sedangkan berdikari dalam bidang ekonomi diwujudkan dalam pembangunan demokrasi ekonomi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam pengelolaan keuangan Negara dan pelaku utama dalam pembentukan produksi dan distribusi nasional. Berkepribadian dalam kebudayaan diwujudkan melalui pembangunan karakter dan kegotongroyongan yang berdasar pada realitas kebhinekaan sebagai kekuatan potensi bangsa dalam mewujudkan implementasi demokrasi politik dan ekonomi Indonesia masa depan.

**Purbalingga yang Berdaya Saing** adalah Purbalingga yang mampu bertahan bahkan sebisa mungkin mampu memenangkan pertarungan dalam kompetisi dan persaingan global. Daya saing masyarakat dan daerah perlu dibangun secara sungguh-sungguh dalam menghadapi persaingan global yang semakin berat, yang antara lain ditandai dengan diberlakukannya perdagangan bebas. Optimalisasi keunggulan komparatif yang dimiliki serta upaya mendorong peningkatan keunggulan kompetitif melalui peningkatan kapasitas pemerintah daerah serta penguatan dunia usaha mutlak diperlukan.

**Purbalingga yang Sejahtera** adalah Purbalingga yang masyarakatnya telah dapat terpenuhi kebutuhan dan harkat martabat hidupnya secara layak, baik yang bersifat fisiologis dan material maupun yang bersifat batiniah seperti ketenteraman, rasa aman, kebersamaan dan cinta kasih serta kebutuhan aktualisasi diri.

Maksud dari **Berakhlak Mulia** adalah bahwa masyarakat sejahtera yang ingin diwujudkan harus diimbangi dengan kualitas moral spiritual masyarakat yang tinggi. Kemajuan yang ingin dicapai tidak hanya dalam dimensi ekonomi-material semata, namun juga mencakup dimensi mental-spiritual dan kultural, agar terwujud kehidupan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin.

Dalam rangka menuju pencapaian Visi tersebut, telah ditetapkan Misi pembangunan daerah yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan Visi yang telah ditetapkan. Adapun Misi Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga adalah sebagai berikut :

1. **Misi 1 : Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, bersih, akuntabel dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat**

Untuk mampu mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, efisien dan efektif, dibutuhkan dukungan aparatur pemerintahan dengan jumlah yang cukup dan dengan kompetensi yang memadai, tata manajemen pengelolaan pemerintahan yang efektif, struktur organisasi yang efisien dengan pembagian tugas dan fungsi yang jelas, dan sikap dan perilaku aparatur yang baik, serta memiliki kepekaan sosial yang tinggi.

Di sisi lain, meningkatnya kesadaran politik rakyat sejalan dengan adanya proses demokratisasi, mengakibatkan semakin menguatnya tuntutan masyarakat untuk terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Di samping itu, adanya kebijakan pemerintah berkaitan dengan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi semakin menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari Misi ke-1 tersebut adalah : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan sasaran : Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.

2. **Misi 2 : Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadiran Allah SWT/Tuhan YME, serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan terciptanya rasa aman dan tenteram dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia**

Salah satu prasyarat bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat adalah terwujudnya lingkungan sosial yang tertib, aman, damai dan tenteram. Kondisi ini harus diciptakan agar berbagai upaya pembangunan dalam rangka

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat dijalankan. Adanya keragaman agama dan budaya, perbedaan kondisi sosial-ekonomi, masalah kemiskinan dan pengangguran, dan berbagai permasalahan sosial lain seperti merebaknya miras dan narkoba, prostitusi, perjudian, dan premanisme, serta meningkatnya kejadian kriminalitas, merupakan faktor-faktor potensial untuk timbulnya gangguan ketertiban, keamanan dan ketenteraman dalam masyarakat.

Selain itu, meningkatnya kesadaran politik masyarakat harus diimbangi dengan upaya-upaya untuk mengembangkan etika politik sehingga dapat diwujudkan kehidupan demokrasi yang lebih bermartabat. Pembangunan karakter dan paham kebangsaan mutlak diperlukan guna terwujudnya rasa nasionalisme yang tinggi.

Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari Misi ke-2 adalah : Meningkatkan kondusifitas wilayah dan masyarakat yang tertib dan toleran, dengan sasaran : Menurunnya konflik sosial dan pelanggaran trantibum.

3. **Misi 3 : Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok masyarakat utamanya pangan dan papan secara layak**

Salah satu indikator keberhasilan penanggulangan kemiskinan adalah tercukupinya kebutuhan pokok manusia antara lain pangan, papan, air bersih, lingkungan permukiman yang sehat dan jaminan sosial bagi seluruh masyarakat. Tercukupinya kebutuhan tersebut secara layak merupakan landasan yang harus di bangun secara kokoh agar pembangunan dapat berjalan dengan lebih cepat, lebih adil dan lebih merata.

Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari Misi ke-3 adalah : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan sasaran :

- a. Meningkatkan ketercukupan kebutuhan pokok masyarakat;
- b. Meningkatkan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.

4. **Misi 4 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat**

Kualitas manusia dan kualitas kehidupan manusia merupakan tujuan yang sebenarnya dari upaya pembangunan. Kualitas manusia dapat diukur dari aspek- aspek yang bersifat lahiriah seperti tingkat pendidikan dan derajat kesehatan.

Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari Misi ke-4 adalah : Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia, serta kesetaraan gender, dengan sasaran :

- a. Meningkatnya kualitas pendidikan;
- b. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
- c. Meningkatnya keberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

5. **Misi 5 : Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya dalam industri pengolahan dan manufaktur, pertanian, perdagangan, jasa, pariwisata, UMKM dan ekonomi kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja**

Upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dilakukan dengan mendorong peningkatan produksi dan nilai tambah pada masing-masing sektor ekonomi. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak serta merta meningkatkan pendapatan per kapita riil seluruh masyarakat apabila tidak terdistribusi secara merata.

Tujuan jangka menengah dari Misi ke - 5 adalah : Meningkatnya daya saing ekonomi daerah, dengan sasaran :

- a. Meningkatnya nilai tambah perekonomian daerah;
- b. Meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha.

6. **Misi 6 : Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa**

Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dilakukan melalui pembangunan berbasis desa dan optimalisasi pendayagunaan sumber daya manusia dan sumber daya alam. Oleh karena itu dibutuhkan pemerintahan desa yang kuat dan didukung oleh lembaga kemasyarakatan desa serta peran serta aktif masyarakat.

Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari Misi ke-6 adalah : Meningkatnya kualitas pengelolaan dan kemandirian desa, dengan sasaran : Meningkatnya status kemandirian desa.

7. **Misi 7 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana wilayah/infrastruktur dengan tetap memperhatikan Kelestarian Lingkungan**

Misi ini dimaksudkan dalam rangka peningkatan daya saing infrastruktur dengan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup. Implementasi misi ini diwujudkan dengan meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas wilayah serta daya dukung lingkungan dalam rangka memfasilitasi aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari Misi ke-7 adalah Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, dengan Sasaran :

- a. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur;
- b. Optimalnya Pemanfaatan Ruang;
- c. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup.

**C. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah**

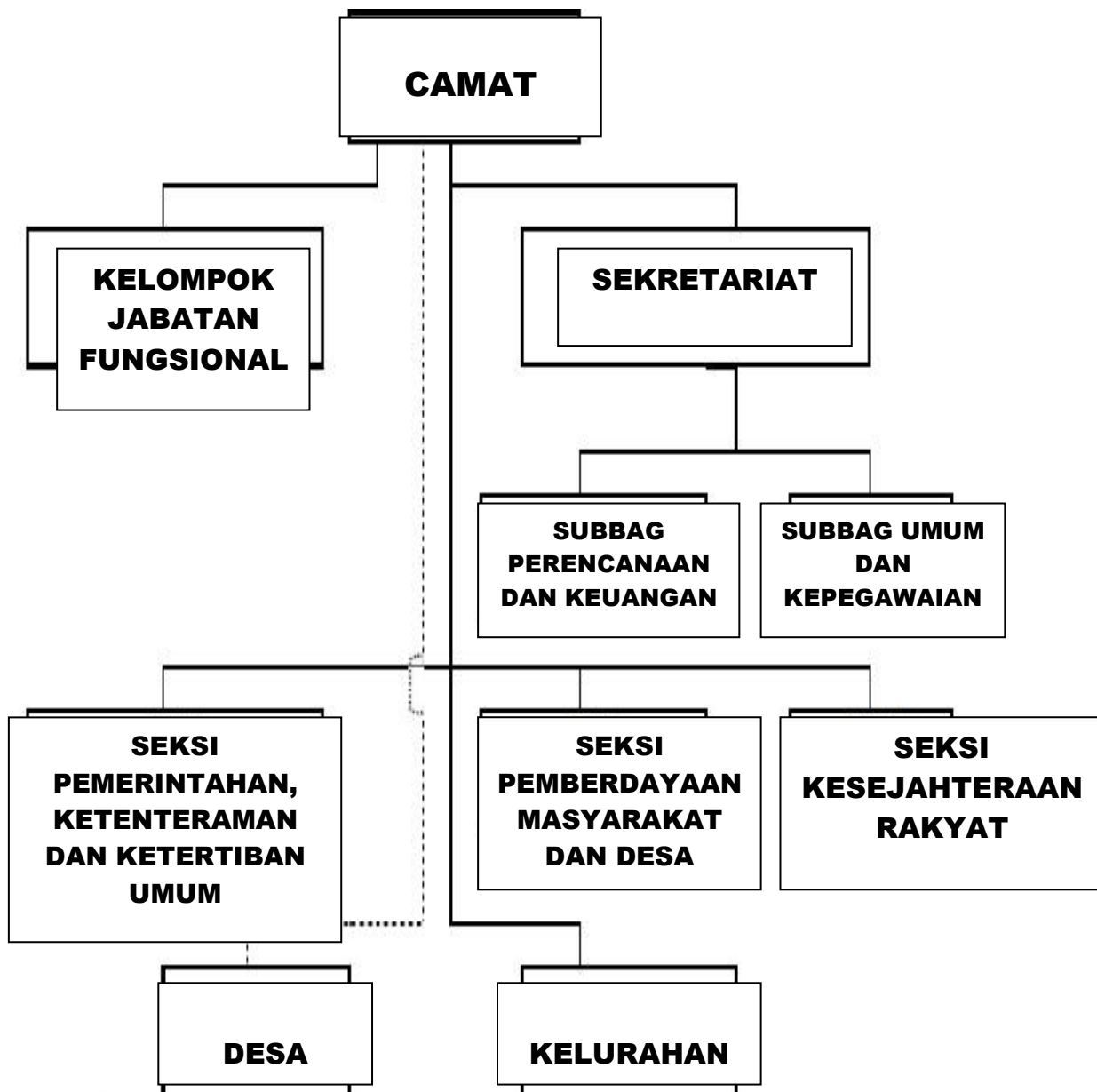
**1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)**

Kecamatan Padamara merupakan bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga, dan Susunan Organisasi Pemerintahannya berdasarkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Purbalingga.

Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan Padamara terdiri atas :

- a. Camat
- b. Sekretariat, membawahi :
  - 1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan
  - 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian
- c. Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- e. Seksi Kesejahteraan Rakyat
- f. Kelurahan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun Bagan Organisasi Kecamatan Padamara seperti pada bagan 1 di bawah ini :



Keterangan :

- = garis komando
- - - - = garis koordinasi

## 2. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Purbalingga, Kecamatan Padamara merupakan koordinator penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan di tingkat Kecamatan.

Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Camat juga melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Tugas dan Fungsi Kecamatan Padamara secara singkat sebagai berikut :

### a. Camat

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam :

- 1) menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- 2) mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 3) mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- 4) mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- 5) mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- 6) mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- 7) membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau Kelurahan;
- 8) melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan;
- 9) melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Camat mempunyai fungsi :



- 1) perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan;
- 2) pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan;
- 3) pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan;
- 4) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan;
- 5) pelaksanaan fungsi kesekretariatan;
- 6) pengoordinasian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan yang ada di Kecamatan;
- 7) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

b. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan adalah unsur pembantu Camat, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan.

Sekretariat mempunyai tugas perencanaan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, keprotokolan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan.

Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi :

- 1) pengoordinasian kegiatan di lingkungan Kecamatan;
- 2) pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Kecamatan;
- 3) pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan;

- 4) pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- 5) penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kecamatan;
- 6) pengoordinasian penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja dan anggaran penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan;
- 7) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari :

- 1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan
- 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian-subbagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan.

- 1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan dan keuangan meliputi penyusunan rencana program kerja dan anggaran, pengendalian program dan kegiatan, pelaksanaan perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi pengelolaan anggaran, pengelolaan data dan informasi serta pelaporan program kerja dan anggaran di lingkungan kecamatan.

- 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang umum dan kepegawaian meliputi pembinaan ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan dan pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan.

c. Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat dan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyelenggaraan pemerintahan umum, fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan, penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, administrasi Pemerintahan Desa, administrasi kependudukan, pertanahan, perizinan, intensifikasi PBB, keamanan wilayah, pembinaan ideologi negara dan bela negara, perlindungan masyarakat, kesatuan polisi pamong praja, peringatan hari besar nasional, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta peraturan perundang-undangan lainnya, inventarisi organisasi politik dan kemasyarakatan, fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, kepala desa dan BPD, fasilitasi pembinaan kelembagaan masyarakat desa/kelurahan meliputi Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW), penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi pemetaan rawan bencana, pencegahan bencana dan penyelenggaraan tanggap darurat, serta penyelenggaraan pelayanan publik.

d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah unsur pelaksana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat dan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi fasilitasi perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan desa/kelurahan, pemberdayaan desa/kelurahan/lomba desa, pembinaan penatausahaan keuangan desa, pemberdayaan kelembagaan masyarakat desa/kelurahan meliputi Rukun Tetangga/ Rukun Warga (RT/RW), Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan (LKMD/LKMK), Karangtaruna dan Kelembagaan Pasca Program Urban *Sanitation and Rural Infrastructure* (USRI), pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam menumbuh- kembangkan gotong royong dan

swadaya masyarakat, pengembangan perekonomian desa/kelurahan, peternakan, perikanan, pertanian, perkebunan, fasilitasi peningkatan kapasitas BUM Desa dan lembaga kerja sama antar-Desa, pendataan potensi desa dan profil desa/kelurahan.

e. Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi Kesejahteraan Rakyat adalah unsur pelaksana Kesejahteraan Rakyat, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat dan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan fasilitasi kegiatan keagamaan, pendidikan, kesehatan masyarakat, keluarga berencana, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), kebudayaan dan kesenian, pemuda dan olahraga, penanggulangan kemiskinan, fasilitasi penyaluran bantuan bencana alam serta pelayanan sosial.

### 3. Kepegawaian

Jumlah pegawai pada Kantor Kecamatan Padamara pada akhir tahun 2021 sebanyak 15 orang yang terdiri dari 9 orang PNS, 1 orang PTT dan 5 orang THL. Keberadaan 15 Pegawai Kecamatan dapat dikelompokkan menurut jenis kelamin, tingkat pendidikan, golongan dan fungsi sebagai berikut :

a. Menurut Jenis Kelamin

Jumlah pegawai pada Kantor Kecamatan Padamara sebanyak 15 orang, dengan komposisi pegawai laki-laki 50% sedangkan jumlah pegawai wanita 50%, seperti terlihat pada tabel sebagai berikut

Tabel 1.1  
Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin Tahun 2021

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	%
1	Laki – laki	9 orang	60,00
2	Perempuan	6 orang	40,00
	JUMLAH	15 orang	100,00

b. Menurut Tingkat Pendidikan

Tabel 1.2  
Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2021

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	%
1	Pasca Sarjana (S2)	0 orang	0,00
2	Sarjana (S1)	8 orang	53,33
3	Diploma ( D3)	1 orang	6,67
3	SLTA	5 orang	33,33
4	SLTP	0 orang	0,00
5	SD	1 orang	6,67
	JUMLAH	15 orang	100,00

Dari jumlah tersebut pegawai dengan pendidikan S1 menduduki urutan pertama yaitu sejumlah 8 orang (53,33%), disusul dengan pegawai dengan klasifikasi pendidikan SLTA/ sederajat sejumlah 5 orang (33,33%), pegawai dengan pendidikan Sarjana Muda sejumlah 1 orang (6,67%), serta pegawai dengan pendidikan SD sejumlah 1 orang (6,67%).

c. Menurut Golongan

Dari komposisi Golongan, PNS dengan Golongan IV berjumlah 1 orang (6,67%), PNS Golongan III berjumlah 6 orang (40,00%), PNS Golongan II sejumlah 2 orang (13,33%), serta pegawai tenaga kontrak jumlahnya 6 orang (40,00), seperti terlihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.3  
Jumlah Pegawai Menurut Golongan / Ruang Tahun 2021

No.	Golongan / Ruang	Jumlah	%
1	Golongan IV	1 orang	6,67
2	Golongan III	6 orang	40,00
3	Golongan II	2 orang	13,33
4	Golongan I	-	-
5	Tenaga Kontrak	6 orang	40,00
	JUMLAH	15 orang	100,00

d. Menurut Fungsi

Komposisi SDM berdasarkan Fungsi dapat dilihat ada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.4  
Komposisi SDM berdasarkan Fungsi Tahun 2021

No	Bagian/Seksi	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Kepala	1		1
2	Sekretaris		1	1
	a. Subbagian Umum dan Kepegawaian	1	2	3
	b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan	1	2	3
3.	Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4		4
4	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	1	2
5	Seksi Kesejahteraan Rakyat	1		1
Jumlah Total		9	6	15

Adapun data kepegawaian selengkapnya sebagaimana terlihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.5  
Daftar PNS di Lingkungan Kecamatan Padamara  
Tahun 2021

No	Nama Pegawai/ NIP	Jabatan/ Golongan	Diklatpim	Pend	Tempat/ Tgl Lahir
1.	Sarno, SIP NIP. 196506221990121001	Camat IV/a	Diklatpim III	S1	Banyumas 22-06-1965
2.	Darni, S.Sos NIP.196606111992012001	Sekretaris Kecamatan III/d	Diklatpim IV	S1	Banyumas, 11-06-1966
3.	Dwy Setyadi, S.IP NIP. 198709232007011001	Kasi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum III/c		S1	Purbalingga 23-09-1987
4.	Tri Puji Mulyani, S.Sos NIP. 197802172010012003	Kasubag Perencanaan dan Keuangan III/c		S1	Purbalingga 17-02-1978
5.	Susi Handayani, SE NIP. 197502232000122001	Kasubag Umum dan kepegawaian III/d		S1	Purbalingga 23-02-1975
6.	Aris Priyanto NIP. 196510301990031007	Petugas Keamanan (Satpol PP) III/a		SLTA	Purbalingga 30-10-1965
7.	Narsito, SH NIP. 197001032009061001	Pengelola Pajak Daerah III/a		S1	Purbalingga 03-01-1970
8.	Susanti NIP. 198607092006042002	Pengelola Keuangan II/d		SLTA	Purbalingga 09-07-1986
9.	Tuginem NIP. 196807272008012010	Pengadministr asi Umum II/d		SLTA	Semarang 27-07-1968

Jumlah Pegawai honorer di kecamatan Padamara dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.6  
Daftar Nama Pegawai Honorer/Tidak Tetap  
dan Tenaga Harian Lepas (THL)  
di Kecamatan Padamara Tahun 2021

No	Nama Lengkap	Pend. Terakhir	Pejabat Yang TTD SK	No. SK/Tgl SK	Jenis Pekerjaan
1	Narpun	SD	Bupati Purbalingga	814/0046/2019 31-12-2019	Petugas Kebersihan
2	Agus Supriono	SMA	Camat Padamara	814/01/2021 04-01-2021	Tenaga Keamanan dan Ketertiban Umum
3	Anggun Rokhmawati, S.Pd	S1	Camat Padamara	814/02/2021 04-01-2021	Operator Komputer
4	Willy Novi Anjasmoro, A.Md. Kom	D3	Camat Padamara	814/03/2021 04-01-2021	Operator Komputer
5	Roy Bamintha Prima, ST	S1	Camat Padamara	814/04/2021 04-01-2021	Operator Komputer
6	Panjer Wisnu Legowo	SMA	Camat Padamara	814/05/2021 04-01-2021	Tenaga Keamanan dan Ketertiban Umum



#### 4. Daftar Aset yang Dikelola

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang.

Secara rinci keberadaan aset OPD Kecamatan Padamara dapat disampaikan sebagai berikut :

##### a. Aset Lancar

Nilai aset lancar Kecamatan Padamara pada awal tahun 2021 sebesar . 4.330.342,00 yang terdiri dari beban dibayar dimuka sebesar Rp. 3.118.842,- dan persediaan sebesar Rp. 1.211.500,-. Pada akhir tahun 2021 nilainya bertambah menjadi Rp. 11.783.654,00 yang terdiri dari beban dibayar dimuka sebesar Rp. 6.399.054,- dan persediaan sebesar Rp. 5.384.600,-. Adanya aset lancar pada awal tahun anggaran di karenakan sisa pembelian pulsa listrik dan beberapa pembelian aset lancar antara lain alat tulis kantor, kertas dan cover, benda pos, perabot kantor, alat listrik, serta natura dan pakan lainnya yang dilaksanakan pada akhir tahun anggaran.

##### b. Aset Tetap

Nilai aset tetap pada awal tahun 2021 sebesar Rp 2.056.614.923,67 dan pada akhir tahun 2021 nilainya bertambah menjadi Rp. 2.166.596.652,04. Peningkatan nilai aset terjadi karena penambahan dan pengurangan aset sebagai berikut :

1) Penambahan aset berupa Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 20.000.000,00 dan Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 248.531.000,00, dengan rincian sebagai berikut

a) Peralatan dan Mesin bertambah bertambah 20.000.000,00

Peralatan dan mesin bertambah karena :

- Adanya pengadaan berupa belanja Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat sebesar Rp. 2.000.000,00
- Adanya pengadaan berupa Belanja Modal Komputer Unit Lainnya sebesar Rp. 18.000.000,00

b) Gedung dan Bangunan bertambah Rp. 248.531.000,00

Penambahan tersebut karena :

- Adanya Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp. 99.290.000,00 yaitu pembangunan kamar mandi dan garasi pelayanan.
  - Adanya Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp. 149.241.000,00 yaitu berupa pemeliharaan rumah dinas camat dan aula kecamatan.
- 2) Pengurangan aset tetap sebesar Rp. 850.000,00 pada Peralatan dan Mesin, dengan rincian sebagai berikut :
- Adanya kebijakan akuntansi sebesar Rp. 850.000,00 karena termasuk barang ekstrakomtable.

Pada akhir tahun 2021 nilai aset OPD sebesar Rp. 2.178.380.306,04 yang terdiri dari :

- 1) Aset lancar dengan nilai Rp. 4.330.342,00 dalam bentuk beban dibayar dimuka senilai Rp. 3.118.842,- dan persediaan senilai Rp. 1.211.500,00
- 2) Aset Tetap dengan nilai Rp. 3.053.207.225,00 dan dikurangi akumulasi penyusutan senilai Rp. 886.610.572,96 sehingga aset tetap tahun 2021 sebesar Rp. 2.166.596.652,04, dengan perincian :
  - a. Tanah Rp. 612.479.100,-
  - b. Peralatan dan Mesin Rp. 753.587.675,-
  - c. Gedung dan Bangunan Rp. 1.613.496.200,-
  - d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan Rp. 7.198.000,-
  - e. Aset Tetap Lainnya Rp. 66.446.250,-
  - f. Konstruksi dalam Pengerjaan Rp. 0,-

Sesuai kebijakan akuntansi yang diterapkan dari nilai aset yang ada, tidak semuanya dicatat dalam laporan neraca OPD, namun ada beberapa aset dengan nilai dibawah batas tertentu maka tidak dicatat dalam KIB maupun neraca. Pada Tahun 2021 telah ditetapkan batas nilai kebijakan akuntansi sebagai berikut :

- Peralatan dan mesin : Rp. 499.999,-
- Bangunan dan Gedung : Rp. 9.999.999,-
- Aset Tetap Lainnya
  - Barang bercorak kebudayaan : Rp. 149.999,-
  - Buku : Rp. 49.900,-

Dari hasil penghitungan dapat diketahui jumlah nilai aset yang terkena kebijakan akuntansi/extrakompetabel adalah sebesar Rp. 24.411.000,- sebagai berikut :

• Tanah	:	Rp.	0,-
• Peralatan dan Mesin	:	Rp.	24.411.000,-
• Bangunan dan Gedung	:	Rp.	0,-
• Jalan, Irigasi dan Jaringan	:	Rp.	0,-
• Aset Tetap Lainnya	:	Rp.	0,-
Jumlah	:	Rp.	24.411.000,-

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah, maka telah ditetapkan peraturan mengenai penyusutan aset tetap. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Pada Tahun 2021 dapat diketahui akumulasi penyusutan aset tetap OPD Kecamatan Padamara sebesar Rp. 886.610.572,96

## 5. Kondisi Geografis Wilayah

Kecamatan Padamara memiliki wilayah seluas 1727. Secara administratif Kecamatan Padamara terdiri dari 13 Desa, 1 kelurahan, 38 dusun, 60 RW dan 243 RT.

Kecamatan Padamara secara geografis terletak di bagian barat wilayah Kabupaten Purbalingga dengan jarak  $\pm$  7 km dari ibukota Kabupaten. Adapun batas wilayah administrasi Kecamatan Padamara sebagai berikut :

Sebelah Utara	:	Berbatasan dengan Kecamatan Kutasari
Sebelah Timur	:	Berbatasan dengan Kecamatan Purbalingga
Sebelah Selatan	:	Berbatasan dengan Kecamatan Kelimanah
Sebelah Barat	:	Berbatasan dengan Kabupaten Banyumas

Wilayah Kecamatan Padamara memiliki kedudukan geografis yang sangat strategis sebagai jalur alternative dengan tingkat aksesibilitas yang tinggi ke wilayah Kabupaten Banyumas sehingga menjadikan wilayah ini sangat potensial untuk tumbuh dan berkembang dengan cepat.

Adapun perincian pembagian wilayah administrasi dan luas wilayah di Kecamatan Padamara adalah sebagai berikut :

Tabel 1.7  
Luas Wilayah Per Desa

No	Desa/Kel	Luas Wilayah (Ha)	Jumlah		
			Dusun	RW	RT
1	Karangsantul	58,10	-	3	15
2	Karangpule	97,32	2	2	9
3	Sokawera	149,11	3	6	16
4	Karangjambe	152,91	4	4	19
5	Bojanegara	115,60	3	5	37
6	Gemuruh	182,94	3	8	19
7	Dawuhan	164,16	5	5	20
8	Prigi	139,99	2	4	14
9	Padamara	141,61	3	3	19
10	Purbayasa	94,98	2	4	12
11	Kalitinggar	94,63	3	3	15
12	Mipiran	134,56	3	6	17
13	Karanggambas	120,75	3	5	22
14	Kalitinggar Kidul	80,34	2	2	9
	Jumlah	1727,00	38	60	243

## 6. Gambaran Umum Demografis

### a. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Jumlah penduduk Kecamatan Padamara menurut jenis kelamin dan persebaran per Desa/Kelurahan pada tahun 2021 adalah sebagaimana tabel 1.8 berikut :

Tabel 1.8  
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Per Desa Tahun 2020-2021

No	Desa/Kel	Jumlah Penduduk Tahun 2020			Jumlah Penduduk Tahun 2021		
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
1	Karangsentul	1.336	1.343	2.679	1.328	1.346	2.679
2	Karangpule	761	714	1.475	775	723	1.475
3	Sokawera	1.291	1.270	2.561	1.307	1.285	2.561
4	Karangjambe	2.041	2.010	4.051	2.052	2.014	4.051
5	Bojanegara	3.193	3.152	6.345	3.205	3.184	6.345
6	Gemuruh	2.081	2.054	4.135	2.094	2.067	4.135
7	Dawuhan	2.109	2.028	4.137	2.136	2.057	4.137
8	Prigi	1.566	1.552	3.118	1.593	1.564	3.118
9	Padamara	1.436	1.484	2.920	1.448	1.493	2.920
10	Purbayasa	1.121	1.121	2.242	1.132	1.131	2.242
11	Kalitnggar	1.333	1.305	2.638	1.339	1.301	2.638
12	Mipiran	1.669	1.650	3.319	1.679	1.666	3.319
13	Karanggambas	2.163	2.125	4.288	2.186	2.145	4.288
14	Kalitnggar Kidul	862	867	1.729	870	879	1.729
	Jumlah	22.962	22.675	45.637	23.144	22.855	45.999

**b. Penduduk Kecamatan Padamara Menurut Kelompok Umur**

Jumlah penduduk Kecamatan Padamara menurut kelompok umur pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 1.9 berikut :

Tabel 1.9  
Jumlah Penduduk Kecamatan Padamara Menurut Kelompok Umur  
Tahun 2021

No	Kelompok Umur	Pria		Wanita		Jumlah	
		n	%	n	%	n	%
1	0 - 4	1.702	3,70	1.651	3,59	3.353	7,29
2	5 - 9	1.928	4,19	1.842	4,00	3.770	8,20
3	10-14	1.968	4,28	1.901	4,13	3.869	8,41
4	15-19	1.796	3,90	1.684	3,66	3.480	7,57
5	20-24	1.844	4,01	1.661	3,61	3.505	7,62
6	25-29	1.703	3,70	1.625	3,53	3.328	7,23
7	30-34	1.550	3,37	1.548	3,37	3.098	6,73
8	35-39	1.856	4,03	1.896	4,12	3.752	8,16
9	40-44	1.856	4,03	1.813	3,94	3.669	7,98
10	45-49	1.657	3,60	1.725	3,75	3.382	7,35
11	50-54	1.480	3,22	1.517	3,30	2.997	6,52
12	55-59	1.245	2,71	1.273	2,77	2.518	5,47
13	60-64	883	1,92	959	2,08	1.842	4,00
14	65-69	640	1,39	650	1,41	1.290	2,80
15	70-74	467	1,02	482	1,05	949	2,06
16	>= 75	569	1,24	628	1,37	1.197	2,60
	Jumlah	23.144	50,31	22.855	49,69	45.999	100,00

**c. Penduduk Kecamatan Padamara Menurut Jenis Pekerjaan**

Jumlah penduduk Kecamatan Padamara menurut jenis pekerjaan pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 2.0 berikut :

Tabel 2.0  
Jumlah Penduduk Kecamatan Padamara Menurut Jenis Pekerjaan  
Tahun 2021

No	Jenis Pekerjaan	Pria	Wanita	Jumlah
1	Belum/Tidak Bekerja	4.387	4.216	8.603
2	Mengurus Rumah Tangga	0	4.525	4.525
3	Pelajar/Mahasiswa	4.439	4.016	8.455
4	Pensiunan	299	95	394
5	Pegawai Negeri Sipil	404	334	738
6	Tentara Nasional Indonesia	90	0	90
7	Kepolisian RI	113	10	123
8	Perdagangan	43	50	93
9	Petani/Pekebun	1.258	1.296	2.554
10	Peternak	4	-	4
11	Nelayan/Perikanan	2	-	2
12	Industri	12	17	29
13	Konstruksi	8	-	8
14	Transportasi	10	1	11
15	Karyawan Swasta	5.228	4.393	9.621
16	Karyawan BUMN	54	20	74
17	Karyawan BUMD	22	9	31
18	Karyawan Honorer	37	41	78
19	Buruh Harian Lepas	3.122	1.820	4.942
20	Buruh Tani/Perkebunan	293	172	465
21	Buruh Peternakan	5	-	5
22	Pembantu Rumah Tangga	-	16	16
23	Tukang Listrik	2	-	2
24	Tukang Batu	97	-	97
25	Tukang Kayu	50	-	50
26	Tukang Sol Sepatu	1	-	1
27	Tukang Las/Pandai Besi	1	-	1
28	Tukang Jahit	15	7	22
29	Tukang Gigi	1	-	1
30	Penata Rias	-	3	3
31	Mekanik	6	-	6

No	Jenis Pekerjaan	Pria	Wanita	Jumlah
32	Peraji	-	3	3
33	Penterjemah	1	-	1
34	Pendeta	1	-	1
35	Wartawan	4	-	4
36	Ustadz/Mubaligh	2	-	2
37	Anggota DPRD Propinsi	1	-	1
38	Dosen	10	8	18
39	Guru	122	268	390
40	Pengacara	1	1	2
41	Konsultan	3	-	3
42	Dokter	7	8	15
43	Bidan	-	39	39
44	Perawat	16	38	54
45	Apoteker	4	-	4
46	Pelaut			1
47	Sopir	190	-	190
48	Pedagang	799	826	1.625
49	Perangkat Desa	102	20	122
50	Kepala Desa	11	1	12
51	Wiraswasta	1.867	597	2.464
52	Lainnya	4	-	4
	Jumlah	23.149	22.850	45.999



#### d. Penduduk Kecamatan Padamara Menurut Tingkat Pendidikan

Jumlah penduduk Kecamatan Padamara menurut tingkat pendidikan pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1  
Jumlah Penduduk Kecamatan Padamara Berdasarkan Pendidikan  
Tahun 2021

No	Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan	Pria	Wanita	Jumlah	%
1	Tidak/belum sekolah	3.956	3.860	7.816	16,99
2	Belum tamat SD/ sederajat	2.293	2.084	4.377	9,52
3	Tamat SD/ sederajat	6.481	7.327	13.808	30,02
4	SLTP/ sederajat	4.744	4.418	9.162	19,92
5	SLTA/ sederajat	4.355	3.711	8.066	17,54
6	Diploma I/II	58	72	103	0,28
7	Akademi/Diploma III/Sarjana Muda	280	399	679	1,48
8	Diploma IV/Strata 1	922	954	1.876	4,08
9	Strata II	52	29	81	0,18
10	Strata III	3	1	4	0,01
	Jumlah	23.144	22.855	45.999	100,00

### 7. Kondisi Ekonomi

#### a. Potensi Unggulan

Potensi unggulan yang dimiliki Kecamatan Padamara adalah

- Potensi Wisata yang merupakan wahana pendidikan berupa Akuarium Raksasa yaitu Purbasari Pancuran Mas yang terletak di Desa Purbayasa
- Kerajinan sapu di Desa Karanggambas yang sudah merambah ke manca negara
- Perikanan di Desa Purbayasa dan Kalitinggar
- Peternakan di Desa Kalitinggar, Desa Mipiran termasuk pengolahan pupuk organik
- Industri Batu Bata di Desa Dawuhan dan Karangjambe
- Pabrik Cat Tembok di desa Prigi
- Pabrik Bulu Mata di Bojanegara, Karangsentul dan Karangjambe
- Pabrik Rokok Sampoerna di Karangjambe
- Pabrik Air Minum Kemasan Yora di Karanggambas

b. Potensi Ekonomi

Secara umum kegiatan perekonomian penduduk di Kecamatan Padamara merupakan kegiatan sektor ekonomi primer yakni kegiatan perekonomian yang hanya mengambil hasil / produk dari sumber daya alam (pertanian, peternakan, perikanan dll). Selain kegiatan sektor ekonomi primer di Kecamatan Padamara. juga terdapat kegiatan ekonomi sekunder. Perdagangan barang dan jasa merupakan kegiatan utama sektor perekonomian sekunder. Di Kecamatan Padamaraberkembang berbagai macam fasilitas perdagangan dan jasa seperti pasar kecamatan dan desa, pertokoan, warung-warung, Bank Nasional/Daerah, Koperasi Simpan Pinjam (KSP),jasa angkutan, bengkel, dll.

Dari 13 desa dan 1 kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Padamara sudah memiliki Produk UMKM makanan olahan, dengan hasil produk unggulan sebagai berikut :

- Karangsantul : Kering Kentang
- Karangpule : Rengginang singkong
- Bojanegara : Sepatu  
Mrs. Kenny (kulit lumpia)
- Prigi : Telur Asin
- Dawuhan : B-Nas (bawang goreng, brambang goreng, kacang ijo kriuk)
- Mipiran : Kripik Tempe, kecap manis
- Karanggambas : Kripik Jiwel (Kriwel), ek krim batok kelapa
- Padamara : Dapur siwi (aneka nasi dan lauk)
- Karangjambe : Kue semprong
- Gemuruh : Kerajinan pot bunga dari satien
- Purbayasa : Kripik Mujaer
- Sokawera : Enaknya diungkep (Bumdes Mutiara Soka)
- Kalitinggar : Keripik usus
- Kalitinggar Kidul : Kacang bawang, piring lidi

## **BAB II**

### **PENJABARAN APBD**

#### **A. Pengelolaan Pendapatan Daerah**

##### **1. Target dan Realisasi Pendapatan**

Pada Tahun Anggaran 2021, OPD Kecamatan Padamara tidak mempunyai target dan realisasi pendapatan.

##### **2. Permasalahan dan Solusi**

Berdasarkan target dan realisasi pendapatan yang tidak ada, maka permasalahan dan solusi tidak ada.

#### **B. Pengelolaan Belanja Daerah**

##### **2. Target dan Realisasi Belanja**

Pada Tahun Anggaran 2021, OPD Kecamatan Padamara mempunyai Target Belanja sesuai pagu anggaran sebesar Rp. 2.880.061.000,00. Adapun realisasi belanja daerah sebesar Rp. 2.667.219.109,00 atau 92,61% dari yang dianggarkan, sehingga masih terdapat sisa anggaran yaitu sebesar Rp. 212.841.891,00 atau 7,39%. Adapun perincian sebagai berikut :

###### **a. Belanja Operasi**

Jumlah alokasi Belanja Operasi tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 2.610.061.000,00 dan realisasinya sebesar Rp. 2.398.688.109,00 atau sebesar 91,90%. Belanja operasi dialokasikan untuk Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa, dengan rincian sebagai berikut :

###### **1) Belanja Pegawai**

Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp. 2.156.033.000,00 dan realisasinya sebesar Rp. 1.981.231.648,00 atau sebesar 91,89%. Belanja pegawai dimaksud dialokasikan untuk membayar gaji dan tunjangan bagi PNS, tambahan penghasilan ASN, dan honorarium.

###### **2) Belanja Barang dan Jasa**

Belanja barang dan jasa dianggarkan sebesar Rp. 454.028.000,00 dan realisasinya sebesar Rp. 417.456.461,00 (91,95%). Belanja barang dan jasa dialokasikan untuk belanja barang dan belanja jasa. Belanja barang dialokasikan untuk belanja barang pakai habis. Sedangkan belanja jasa dialokasikan antara lain untuk belanja jasa kantor, belanja iuran jaminan/asuransi, belanja sewa peralatan dan mesin, belanja sewa aset tetap lainnya, belanja pemeliharaan, dan belanja perjalanan dinas.

b. Belanja Modal

Alokasi anggaran untuk Belanja Modal tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp. 270.000,000.00 dan penyerapan anggaran selama tahun 2021 sebesar Rp. 268.531,00 atau sebesar 99,46%. Alokasi belanja modal tersebut untuk belanja modal peralatan dan mesin, yaitu pengadaan peralatan personal komputer, dan belanja modal gedung dan bangunan.

Selengkapnya terkait Target dan Realisasi Belanja Tahun 2021 sebagaimana tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2  
Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2021

No	Belanja Daerah	Target (Rp)	Realisasi	
			(Rp)	%
1	<b>Belanja Operasi</b>	2.610.061.000	2.398.688.109	91,90
	Belanja Pegawai	2.156.033.000	1.981.231.648	91,89
	Belanja Barang & Jasa	454.028.000	417.456.461	91,95
	Belanja Hibah			
2	<b>Belanja Modal</b>	270.000.000	268.531.000	99,46
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	200.000.000	200.000.000	100,00
	Belanja Modal Gedung & Bangunan	250.000.000	248.531.000	98,72
	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	6.500.000	6.500.000	99,41
	<b>Total Belanja</b>	<b>2.880.061.000</b>	<b>2.667.219.109</b>	<b>92,61</b>

**BAB III**  
**HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN**  
**YANG MENJADI KEWENANGAN**

**A. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

**1. Capaian Kinerja Program sesuai Target Kinerja yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja**

**a. Perjanjian Kinerja**

Sejalan dengan telah ditetapkannya RPJMD Kabupaten Purbalingga, maka OPD Kecamatan Padamara juga diwajibkan membuat Rencana Strategis 2021, yang tentunya hal tersebut juga diikuti dengan Penetapan Kinerja Tahun 2021 yang merupakan kontrak kinerja Kepala OPD dengan Pimpinan Daerah.

Penetapan Kinerja tersebut dalam bentuk tabel sebagai berikut

**Tabel 2.3**  
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**OPD : KECAMATAN PADAMARA**  
**KABUPATEN PURBALINGGA**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	85
2	Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Yang Diserahkan Tepat Waktu Sesuai Ketentuan	- tersusunnya dokumen renstra dan renja	2 dokumen
		- jumlah dokumen evaluasi yang disusun	4 dokumen
3	Prosentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	- Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayar tepat waktu	22 ASN
		- Jumlah kunjungan lapangan/survey/koo rdinasi/undangan/ sppd dalam dan luar daerah	25 ok

		- Tersedianya honor pengelola keuangan, pejabat pengadaan, pemeriksa hasil pekerjaan	12 orang
		- Tersusunnya SPM, LRA, dan laporan keuangan, spj	4 dokumen
4	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor	- Tersedianya perlengkapan listrik	12 bulan
		Tersedianya peralatan rumah tangga	12 bulan
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12 bulan
		Tersedianya jasa cetak dan Penggandaan	12 bulan
		- Tersedianya surat kabar dan majalah	12 bulan
		- Tersedianya jamuan rapat	12 bulan
5	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Tersedianya gedung kantor atau bangunan lainnya	1 paket
6	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Tersedianya perangkat, materai, jasa pos dan jasa pengiriman	12 bulan
		- Tersedianya jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan
		- Terpeliharanya peralatan kantor	12 bulan
		- Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan
7	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (12 bulan)	- Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas / lapangan dan jasa pengemudi	9 Unit
		- Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	5 jenis

		- Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Paket
8	Jumlah rekomendasi terkait penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan (4 dokumen)	- Jumlah fasilitasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa	26 kegiatan
9	Jumlah Pelayanan Yang Dilaksanakan (16 jenis)	- Jumlah laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	12 dokumen
10	Jumlah fasilitasi Lembaga dan forum Masyarakat (5 kegiatan)	- Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan musrenbangdes/mus kel tepat waktu	14 desa/ kelurahan
		- Jumlah kegiatan masyarakat yang difasilitasi	12 kegiatan
11	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (12 kegiatan)	- Jumlah kegiatan sinergitas oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan	10 kegiatan
		- Jumlah kegiatan bersama tokoh agama/tokoh masyarakat	2 kegiatan
12	Jumlah laporan bulanan potensi konflik (12 bulan)	- Jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	4 kegiatan

No	Program	Anggaran (Rp)	Ket.
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kabupaten (Generik)	2.677.283.500	APBD
	a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.304.000	APBD
	b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.215.885.000	APBD
	c. Administrasi Umum Perangkat Daerah	86.981.500	APBD
	d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	120.600.000	APBD
	e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75.593.000	APBD
	f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	175.920.000	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	30.891.000	APBD
	a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	30.225.000	APBD
	b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	666.000	APBD
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	89.390.000	APBD
	a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	89.390.000	APBD
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	29.230.000	APBD
	a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	29.230.000	APBD
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	53.266.500	APBD
	a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	53.266.500	APBD



b. **Pengukuran Kinerja**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Kecamatan Padamara selaku pengemban amanah masyarakat dan selaku perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan berusaha melaksanakan kewajiban tersebut.

Untuk mengetahui gambaran mengenai Tingkat Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Sasaran dan dengan Penilaian, indikator sasaran lebih mencerminkan keberhasilan pembangunan dan mencerminkan efektifitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan.

Dalam pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator pada tiap kegiatan, dalam melaksanakan tugas sehari-hari pencapaian Kinerja OPD Kecamatan Padamara Tahun 2021 menggunakan interpretasi pencapaian kinerja dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang digambarkan sebagai berikut :

- Diatas 100 : Sangat Baik
- 80 s/d 100 : Baik
- 55 s/d 80 : Sedang
- Dibawah 55 : Kurang

Penghitungan prosentase pencapaian rencana tingkat capaian (Formulir Pengukuran Kinerja), perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, dengan ketentuan semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, dengan menggunakan rumus :

$$\% \text{ Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja kemudian dilakukan analisa pencapaian kinerja kegiatan yang ditempuh. Analisa pencapaian kinerja pada OPD Kecamatan Padamara dapat dilihat apakah visi dan misi yang ditetapkan serta kebijakan yang dituangkan dalam program maupun kegiatan dapat mendukung terwujudnya visi dan misi yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran strategis diperoleh rata-rata capaian sasaran strategis sebesar 97,86% dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 2.4**  
**Pengukuran Kinerja Kecamatan Padamara per Sasaran Strategis**  
**Tahun 2021**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	84,97	99,96
<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PER SASARAN STRATEGIS</b>				<b>99,96</b>
Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Yang Diserahkan Tepat Waktu Sesuai Ketentuan	tersusunnya dokumen renstra dan renja	2 dokumen	2 dokumen	100
	jumlah dokumen evaluasi yang disusun	4 dokumen	4 dokumen	100
<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PER SASARAN STRATEGIS</b>				<b>100</b>
Prosentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan nya terbayar tepat waktu	22 ASN	22 ASN	100
	Jumlah kunjungan lapangan/survey/ koordinasi/undangan/ sspd dalam dan luar daerah	25 ok	20 ok	88,46
	Tersedianya honor pengelola keuangan, pejabat pengadaan, pemeriksa hasil pekerjaan	12 orang	12 orang	100
	Tersusunnya SPM, LRA, dan laporan keuangan, spj	4 dokumen	4 dokumen	100
<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PER SASARAN STRATEGIS</b>				<b>100</b>

Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor	Tersedianya perlengkapan listrik	12 bulan	10 unit	100
	Tersedianya peralatan rumah tangga	12 bulan	12 bulan	100
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12 bulan	100
	Tersedianya jasa cetak dan Penggandaan	12 bulan	12 bulan	100
	Tersedianya surat kabar dan majalah	12 bulan	12 bulan	100
	Tersedianya jamuan rapat	12 bulan	12 bulan	100
<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PER SASARAN STRATEGIS</b>				<b>100</b>
Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya gedung kantor atau bangunan lainnya	1 paket	1 paket	100
<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PER SASARAN STRATEGIS</b>				<b>100</b>
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya perangkat, materai, jasa pos dan jasa pengiriman	12 bulan	12 bulan	100
	Tersedianya jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	100
	Terpeliharanya peralatan kantor	12 bulan	12 bulan	100
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 bulan	100
<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PER SASARAN STRATEGIS</b>				<b>100</b>
Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas / lapangan dan jasa pengemudi	9 Unit	9 Unit	100
	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	5 jenis	5 jenis	100
	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Paket	1 Paket	100
<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PER SASARAN STRATEGIS</b>				<b>100</b>

Jumlah rekomendasi terkait penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa	26 kegiatan	22 kegiatan	84,62
<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PER SASARAN STRATEGIS</b>				84,62
Jumlah Pelayanan Yang Dilaksanakan	Jumlah laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	12 dokumen	11 dokumen	91,67
<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PER SASARAN STRATEGIS</b>				91,67
Jumlah fasilitasi dan forum Lembaga dan Kemasyarakatan	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan musrenbangdes/ muskel tepat waktu	14 desa/ kelurahan	14 desa/ kelurahan	100
	Jumlah kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi	12 kegiatan	10 kegiatan	83,33
<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PER SASARAN STRATEGIS</b>				91,67
Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan sinergitas oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan	10 kegiatan	9 kegiatan	90
	Jumlah kegiatan bersama tokoh agama/tokoh masyarakat	2 kegiatan	2 kegiatan	100
<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PER SASARAN STRATEGIS</b>				95
Jumlah laporan bulanan potensi konflik (12 bulan)	Jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	4 kegiatan	4 kegiatan	100
<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PER SASARAN STRATEGIS</b>				100
<b>NILAI RATA RATA KINERJA</b>				<b>97,86</b>

## 2. Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan

Guna mendukung pencapaian kegiatan OPD Kecamatan Padamara pada Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah ditetapkan dan dilaksanakan, maka anggaran biaya yang digunakan berupa Belanja Operasi dan Belanja Modal yang sumber dananya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purbalingga yang tertuang dalam DPA Kecamatan Padamara Tahun Anggaran 2021.

Adapun perincian target dan realisasi belanja OPD sebagai berikut :

Tabel 2.3  
Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan  
Kecamatan Padamara  
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

No	Uraian	Pagu APBD	Realisasi	
			(Rp)	%
1	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>396.000</b>	<b>135.000</b>	<b>34,09</b>
	<b>Belanja Barang</b>	<b>396.000</b>	<b>135.000</b>	<b>34,09</b>
	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>396.000</b>	<b>135.000</b>	<b>34,09</b>
	a. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	135.000	135.000	100,00
	b. Belanja Makanan dan Minuman Rapat	126.000	0	0,00
		<b>396.000</b>	<b>135.000</b>	<b>34,09</b>

Tabel 2.4  
Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan  
Kecamatan Padamara  
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

No	Uraian	Pagu APBD	Realisasi	
			(Rp)	%
1	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>1.908.000</b>	<b>1.908.000</b>	<b>100,00</b>
	<b>Belanja Barang</b>	<b>1.908.000</b>	<b>1.908.000</b>	<b>100,00</b>
	Belanja Barang Pakai Habis	1.908.000	1.908.000	34,09
	a. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tuis Kantor	408.000	408.000	100,00
	b. Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.500.000	1.500.000	100,00
		<b>1.908.000</b>	<b>1.908.000</b>	<b>100,00</b>

Tabel 2.5

Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan  
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

No	Uraian	Pagu APBD	Realisasi	
			(Rp)	%
1	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>2.111.133.000</b>	<b>1.939.531.648</b>	<b>91,87</b>
	<b>Belanja Gaji dan Tunjangan ASN</b>	1.304.572.000	1.251.470.148	95,93
	Belanja Gaji Pokok ASN	969.153.000	928.417.100	95,80
	a. Belanja Gaji Pokok PNS	969.153.000	928.417.100	95,80
	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	88.755.000	87.411.626	98,49
	a. Belanja Tunjangan Keluarga PNS	88.755.000	87.411.626	98,49
	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	84.822.000	84.400.000	99,50
	a. Belanja Tunjangan Jabatan PNS	84.822.000	84.400.000	99,50
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	24.161.000	22.930.000	94,91
	a. Belanja Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	24.161.000	22.930.000	94,91
	Belanja Tunjangan Beras ASN	52.404.000	51.780.300	98,81
	a. Belanja Tunjangan Beras PNS	52.404.000	51.780.300	98,81
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	4.563.000	4.576.860	100,30
	a. Belanja PPh/Tunjangan Khusus PNS	4.563.000	4.576.860	100,30
	Belanja Pembulatan Gaji ASN	28.000	13.641	48,72
	a. Belanja Pembulatan Gaji PNS	28.000	13.641	48,72
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	66.956.000	64.306.762	96,04
	a. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	66.956.000	64.306.762	96,04
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.974.000	1.908.461	96,68
	a. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.974.000	1.908.461	96,68
	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	5.920.000	5.725.398	96,71
	a. Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	5.920.000	5.725.398	96,71
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tapera ASN	5.836.000	0	00,00
	a. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tapera PNS	5.836.000	0	00,00
	<b>Belanja Tambahan Penghasilan ASN</b>	<b>806.561.000</b>	<b>688.061.500</b>	<b>85,31</b>
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN	580.125.000	503.437.500	86,78
	a. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS	580.125.000	503.437.500	86,78
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja ASN	226.436.000	184.624.000	81,53
	a. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja PNS	226.436.000	184.624.000	81,53
		<b>2.111.133.000</b>	<b>1.939.531.648</b>	<b>91,87</b>

Tabel 2.6  
 Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan  
 Kecamatan Padamara  
 Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

No	Uraian	Pagu APBD	Realisasi	
			(Rp)	%
1	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>1.770.000</b>	<b>1.540.000</b>	<b>87,01</b>
	Belanja Perjalanan Dinas	1.770.000	1.540.000	87,01
	Belanja Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.770.000	1.540.000	87,01
	a. Belanja Belanja Perjalanan Dinas . Biasa	1.770.000	1.540.000	87,01
		<b>1.908.000</b>	<b>1.908.000</b>	<b>100,00</b>

Tabel 2.7  
 Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan  
 Kecamatan Padamara  
 Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi  
 Keuangan SKPD

No	Uraian	Pagu APBD	Realisasi	
			(Rp)	%
1	<b>Belanja Operasi</b>	<b>82.762.000</b>	<b>81.362.000</b>	<b>98,31</b>
	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>28.200.000</b>	<b>28.200.000</b>	<b>100,00</b>
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	28.200.000	28.200.000	100,00
	Belanja Honorarium	26.400.000	26.400.000	100,00
	a. Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	25.600.000	25.600.000	100,00
	b. Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	800.000	800.000	100,00
	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	1.800.000	1.800.000	100,00
	a. Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak menghasilkan Pendapatan	1.800.000	1.800.000	100,00
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>54.562.000</b>	<b>53.162.000</b>	<b>97,43</b>
	<b>Belanja Barang</b>	<b>1.262.000</b>	<b>1.262.000</b>	<b>100,00</b>
	Belanja Barang Pakai Habis	1.262.000	1.262.000	100,00
	a. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	1.262.000	1.262.000	100,00

	<b>Belanja Jasa</b>	<b>53.300.000</b>	<b>51.900.000</b>	<b>97,37</b>
	Belanja Jasa Kantor	53.300.000	51.900.000	97,37
	a. Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak menghasilkan Pendapatan	1.800.000	1.800.000	100,00
	b. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat tim Pelaksana Kegiatan	1.200.000	1.200.000	100,00
	c. Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	50.300.000	48.900.000	97,22
		<b>82.762.000</b>	<b>81.362.000</b>	<b>98,31</b>

Tabel 2.8  
Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan  
Kecamatan Padamara  
Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis  
Realisasi Anggaran

No	Uraian	Pagu APBD	Realisasi	
			(Rp)	%
1	<b>Belanja Operasi</b>	<b>20.220.000</b>	<b>19.884.000</b>	<b>98,34</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>20.220.000</b>	<b>19.884.000</b>	<b>98,34</b>
	Belanja Barang	8.684.000	8.684.000	100,00
	Belanja Barang Pakai Habis	8.684.000	8.684.000	100,00
	a. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	2.704.000	2.704.000	100,00
	b. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	3.000.000	3.000.000	100,00
	c. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer	2.980.000	2.980.000	100,00
	<b>Belanja Jasa</b>	<b>11.536.000</b>	<b>11.200.000</b>	<b>97,09</b>
	Belanja Jasa Kantor	11.200.000	11.200.000	100,00
	a. Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	11.200.000	11.200.000	100,00
	Belanja luran Jaminan/Asuransi	336.000	0	0
	b. Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	120.000	0	0
	c. Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	216.000	0	0
		<b>20.220.000</b>	<b>19.884.000</b>	<b>98,34</b>



Tabel 2.9  
 Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan  
 Kecamatan Padamara  
 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/  
 Penerangan Bangunan Kantor

No	Uraian	Pagu APBD	Realisasi	
			(Rp)	%
1	<b>Belanja Operasi</b>	<b>1.735.000</b>	<b>1.734.600</b>	<b>99,98</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>1.735.000</b>	<b>1.734.600</b>	<b>99,98</b>
	Belanja Barang	1.735.000	1.734.600	99,98
	Belanja Barang Pakai Habis	1.735.000	1.734.600	99,98
	a. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik	1.735.000	1.734.600	99,98
		<b>1.735.000</b>	<b>1.734.600</b>	<b>99,98</b>

Tabel 3.0  
 Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan  
 Kecamatan Padamara  
 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

No	Uraian	Pagu APBD	Realisasi	
			(Rp)	%
1	<b>Belanja Operasi</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>100,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>100,00</b>
	Belanja Barang	800.000	800.000	100,00
	Belanja Barang Pakai Habis	800.000	800.000	100,00
	a. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor Lainnya	800.000	800.000	100,00
		<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>100,00</b>

Tabel 3.1  
 Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan  
 Kecamatan Padamara  
 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

No	Uraian	Pagu APBD	Realisasi	
			(Rp)	%
1	<b>Belanja Operasi</b>	<b>49.510.000</b>	<b>49.431.000</b>	<b>99,84</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>49.510.000</b>	<b>49.431.000</b>	<b>99,84</b>
	Belanja Barang	49.510.000	49.431.000	99,84
	Belanja Barang Pakai Habis	49.510.000	49.431.000	99,84
	a. Belanja Bahan - Bahan Bakar dan Pelumas	44.064.000	44.064.000	100,00
	b. Belanja Bahan - Isi Tabung Gas	900.000	900.000	100,00
	c. Belanja Bahan - Bahan Lainnya	152.000	73.000	48,03
	d. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	3.344.000	3.344.000	100,00
	e. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Suvenir/Cenderamata	1.050.000	1.050.000	100,00
		<b>49.510.000</b>	<b>49.431.000</b>	<b>99,84</b>

Tabel 3.2  
 Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan  
 Kecamatan Padamara  
 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

No	Uraian	Pagu APBD	Realisasi	
			(Rp)	%
1	<b>Belanja Operasi</b>	<b>1.060.000</b>	<b>1.060.000</b>	<b>100,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>1.060.000</b>	<b>1.060.000</b>	<b>100,00</b>
	Belanja Jasa	1.060.000	1.060.000	100,00
	Belanja Barang Pakai Habis	1.060.000	1.060.000	100,00
	a. Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.060.000	1.060.000	100,00
		<b>1.060.000</b>	<b>1.060.000</b>	<b>100,00</b>

Tabel 3.3  
 Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan  
 Kecamatan Padamara  
 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material

No	Uraian	Pagu APBD	Realisasi	
			(Rp)	%
1	<b>Belanja Operasi</b>	<b>10.409.000</b>	<b>10.409.000</b>	<b>100,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>10.409.000</b>	<b>10.409.000</b>	<b>100,00</b>
	Belanja Barang	10.409.000	10.409.000	100,00
	Belanja Barang Pakai Habis	10.409.000	10.409.000	100,00
	a. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	3 639 000	3 639 000	100,00
	b. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	5.090.000	5.090.000	100,00
	c. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer	1.655.000	1.655.000	100,00
	d. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	25.000	25.000	100,00
		<b>10.409.000</b>	<b>10.409.000</b>	<b>100,00</b>

Tabel 3.4  
 Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan  
 Kecamatan Padamara  
 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

No	Uraian	Pagu APBD	Realisasi	
			(Rp)	%
1	<b>Belanja Operasi</b>	<b>17.880.000</b>	<b>17.878.500</b>	<b>99,99</b>
	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>4.500.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>100,00</b>
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	4.500.000	4.500.000	100,00
	Belanja Honorarium	4.500.000	4.500.000	100,00
	a. Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	4.500.000	4.500.000	100,00
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>13.380.000</b>	<b>13.378.500</b>	<b>99,99</b>
	Belanja Barang	13.380.000	13.378.500	99,99
	Belanja Barang Pakai Habis	13.380.000	13.378.500	99,99
	a. Belanja Natura dan Pakan-Natura	2 530 000	2.528.500	99,94
	b. Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.700.000	7.700.000	100,00
	c. Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.150.000	3.150.000	100,00
		<b>17.880.000</b>	<b>17.878.500</b>	<b>99,99</b>

Tabel 3.5  
 Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan  
 Kecamatan Padamara  
 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Mesin Lainnya

No	Uraian	Pagu APBD	Realisasi	
			(Rp)	%
1	<b>Belanja Operasi</b>	<b>20.600.000</b>	<b>20.600.000</b>	<b>100,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>20.600.000</b>	<b>20.600.000</b>	<b>100,00</b>
	Belanja Barang	600.000	600.000	100,00
	Belanja Barang Pakai Habis	600.000	600.000	100,00
	a. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer	300.000	300,00	99,94
	b. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor Lainnya	300.000	300.000	100,00
2	<b>Belanja Modal</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>100,00</b>
	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>100,00</b>
	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.000.000	2.000.000	100,00
	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	2.000.000	2.000.000	100,00
	a. Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	2.000.000	2.000.000	100,00
	Belanja Modal Komputer	18.000.000	18.000.000	100,00
	Belanja Modal Komputer Unit	18.000.000	18.000.000	100,00
	a. Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	18.000.000	100,00	100,00
		<b>20.600.000</b>	<b>20.600.000</b>	<b>100,00</b>

Tabel 3.6  
 Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan  
 Kecamatan Padamara  
 Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor  
 atau Bangunan Lainnya

No	Uraian	Pagu APBD	Realisasi	
			(Rp)	%
1	<b>Belanja Modal</b>	<b>100.000.000</b>	<b>99.290.000</b>	<b>99,29</b>
	<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</b>	<b>100.000.000</b>	<b>99.290.000</b>	<b>99,29</b>
	Belanja Modal Bangunan Gedung	100.000.000	99.290.000	99,29
	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	100.000.000	99.290.000	99,29
	a. Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	100.000.000	99.290.000	99,29
		<b>100.000.000</b>	<b>99.290.000</b>	<b>99,29</b>

Tabel 3.7  
 Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan  
 Kecamatan Padamara  
 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

No	Uraian	Pagu APBD	Realisasi	
			(Rp)	%
1	<b>Belanja Operasi</b>	<b>330 000</b>	<b>330,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>330 000</b>	<b>330,00</b>	<b>100,00</b>
	Belanja Barang	330 000	330,00	100,00
	Belanja Barang Pakai Habis	330 000	330,00	100,00
	a. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos	330 000	330,00	100,00
		<b>330 000</b>	<b>330,00</b>	<b>100,00</b>

Tabel 3.8  
 Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan  
 Kecamatan Padamara  
 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

No	Uraian	Pagu APBD	Realisasi	
			(Rp)	%
1	<b>Belanja Operasi</b>	<b>19.920 000</b>	<b>16.180.091</b>	<b>81,23</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>19.920 000</b>	<b>16.180.091</b>	<b>81,23</b>
	Belanja Jasa	19.920 000	16.180.091	81,23
	Belanja Jasa Kantor	19.920 000	16.180.091	81,23
	a. Belanja Tagihan Telepon	600.000	396.539	66,09
	b. Belanja Tagihan Air	2.520.000	1.402.758	55,67
	c. Belanja Tagihan Listrik	14.400.000	14.380.794	99,87
	d. Belanja Tagihan Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.400 000	0,00	0,00
		<b>19.920 000</b>	<b>16.180.091</b>	<b>81,23</b>

Tabel 3.9  
 Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan  
 Kecamatan Padamara  
 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

No	Uraian	Pagu APBD	Realisasi	
			(Rp)	%
1	<b>Belanja Operasi</b>	<b>815.000</b>	<b>810.000</b>	<b>99,39</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>815.000</b>	<b>810.000</b>	<b>99,39</b>
	Belanja Barang	815.000	810.000	99,39
	Belanja Barang Pakai Habis	815.000	810.000	99,39
	a. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	815.000	810.000	99,39
		<b>815.000</b>	<b>810.000</b>	<b>99,39</b>

Tabel 4.0  
 Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan  
 Kecamatan Padamara  
 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

No	Uraian	Pagu APBD	Realisasi	
			(Rp)	%
1	<b>Belanja Operasi</b>	<b>54.528.000</b>	<b>53.200.000</b>	<b>97,56</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>54.528.000</b>	<b>53.200.000</b>	<b>97,55</b>
	Belanja Jasa	53.200.000	53.200.000	100,00
	Belanja Jasa Kantor	53.200.000	53.200.000	100,00
	a. Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	22.800.000	22.800.000	100,00
	b. Belanja Jasa Tenaga Keamanan	30.400.000	30.400.000	100,00
	Belanja luran Jaminan/Asuransi	1.328.000	0	0,00
	a. Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.042.000	0	0,00
	b. Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	130.000	0	0,00
	c. Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	156.000	0	0,00
		<b>54.528.000</b>	<b>53.200.000</b>	<b>97,56</b>

Tabel 4.1  
 Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan  
 Kecamatan Padamara  
 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan  
 Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan

No	Uraian	Pagu APBD	Realisasi	
			(Rp)	%
1	<b>Belanja Operasi</b>	<b>21.620.000</b>	<b>18.717.390</b>	<b>86,57</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>21.620.000</b>	<b>18.717.390</b>	<b>86,57</b>
	Belanja Barang	3.480.000	1.050.682	30,19
	Belanja Barang Pakai Habis	3.480.000	1.050.682	30,19
	a. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.480.000	1.050.682	30,19
	Belanja Pemeliharaan	18.140.000	17.666.708	97,39
	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	18.140.000	17.666.708	97,39
	a. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	13.865.000	13.861.708	99,98
	b. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Roda Dua	4.275.000	3.805.000	89,01
		<b>21.620.000</b>	<b>18.717.390</b>	<b>86,57</b>

Tabel 4.2  
 Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan  
 Kecamatan Padamara  
 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

No	Uraian	Pagu APBD	Realisasi	
			(Rp)	%
1	<b>Belanja Operasi</b>	<b>4.300.000</b>	<b>4.230.000</b>	<b>98,37</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>4.300.000</b>	<b>4.230.000</b>	<b>98,37</b>
	Belanja Pemeliharaan	4.300.000	4.230.000	98,37
	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.300.000	4.230.000	98,37
	a. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	3.080.000	3.080.000	00,00
	b. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	1.220.000	1.150.000	94,26
		<b>4.300.000</b>	<b>4.230.000</b>	<b>98,37</b>

Tabel 4.3  
 Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan  
 Kecamatan Padamara  
 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

No	Uraian	Pagu APBD	Realisasi	
			(Rp)	%
1	<b>Belanja Modal</b>	<b>150.000.000</b>	<b>149.241.000</b>	<b>99,49</b>
	<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</b>	<b>150.000.000</b>	<b>149.241.000</b>	<b>99,49</b>
	Belanja Modal Bangunan Gedung	150.000.000	149.241.000	99,49
	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	150.000.000	149.241.000	99,49
	a. Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	150.000.000	149.241.000	99,49
		<b>150.000.000</b>	<b>149.241.000</b>	<b>99,49</b>

Tabel 4.4  
 Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan  
 Kecamatan Padamara  
 Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan

No	Uraian	Pagu APBD	Realisasi	
			(Rp)	%
1	<b>Belanja Operasi</b>	<b>30.225.000</b>	<b>19.180.000</b>	<b>63,46</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>30.225.000</b>	<b>19.180.000</b>	<b>63,46</b>
	Belanja Barang	20.925.000	17.280.000	82,58
	Belanja Barang Pakai Habis	20.925.000	17.280.000	82,58
	a. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	1.400.000	1.400.000	100,00
	b. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	900.000	900.000	100,00
	c. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	700.000	700.000	100,00
	d. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos	100.000	60.000	60,00
	e. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer	1.725.000	1.725.000	100,00
	f. Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.100.000	12.495.000	77,61
	Belanja Perjalanan Dinas	9.300.000	1.900.000	20,43
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	9.300.000	1.900.000	20,43
	a. Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6.300.000	0	0,00
	b. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3.000.000	1.900.000	63,33
		<b>30.225.000</b>	<b>19.180.000</b>	<b>63,46</b>



Tabel 4.5  
 Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan  
 Kecamatan Padamara  
 Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait  
 dengan Nonperizinan

No	Uraian	Pagu APBD	Realisasi	
			(Rp)	%
1	<b>Belanja Operasi</b>	<b>666.000</b>	<b>540.000</b>	<b>81,08</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>666.000</b>	<b>540.000</b>	<b>81,08</b>
	Belanja Barang	666.000	540.000	81,08
	Belanja Barang Pakai Habis	666.000	540.000	81,08
	a. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	426.000	300.000	70,42
	b. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	240.000	240.000	100,00
		<b>666.000</b>	<b>540.000</b>	<b>81,08</b>

Tabel 4.6  
 Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan  
 Kecamatan Padamara  
 Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam  
 Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

No	Uraian	Pagu APBD	Realisasi	
			(Rp)	%
1	<b>Belanja Operasi</b>	<b>45.538.000</b>	<b>32.625.000</b>	<b>71,64</b>
	<b>Belanja Pegawai</b>	6.500.000	4.300.000	66,15
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	6.500.000	4.300.000	66,15
	Belanja Honorarium	6.500.000	4.300.000	66,15
	a. Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6.500.000	4.300.000	66,15
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>39.038.000</b>	<b>28.325.300</b>	<b>72,56</b>
	Belanja Barang	39.038.000	28.325.300	72,56
	Belanja Barang Pakai Habis	23.028.000	15.850.300	68,83
	a. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	2.568.000	2.568.000	100,00
	b. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	1.575.000	1.575.000	100,00
	c. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	1.180.000	1.177.300	99,77
	d. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos	130.000	130.000	100,00

	e. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer	1.300.000	1.300.000	100,00
	f. Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.525.000	8.050.000	55,42
	g. Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.750.000	1.050.000	60,00
	Belanja Jasa	11.050.000	11.050.000	100,00
	Belanja Jasa Kantor	11.050.000	11.050.000	100,00
	a. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	11.050.000	11.050.000	100,00
	Belanja Perjalanan Dinas	4.960.000	1.425.000	28,73
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.960.000	1.425.000	28,73
	a. Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.010.000	0	0,00
	b. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.950.000	1.425.000	36,08
		<b>45.538.000</b>	<b>32.625.000</b>	<b>71,64</b>

Tabel 4.7

Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan  
Kecamatan Padamara  
Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan  
Masyarakat di Wilayah Kecamatan

No	Uraian	Pagu APBD	Realisasi	
			(Rp)	%
1	<b>Belanja Operasi</b>	<b>43.852.000</b>	<b>40.199.500</b>	<b>91,67</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>43.852.000</b>	<b>40.199.500</b>	<b>91,67</b>
	Belanja Barang	43.852.000	40.199.500	91,67
	Belanja Barang Pakai Habis	22.627.000	27.574.500	99,81
	a. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	1.357.000	1.357.000	100,00
	b. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	300.000	300.000	100,00
	c. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	210.000	157.500	75,00
	d. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos	60.000	60.000	100,00
	e. Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	3.300.000	3.300.000	100,00
	f. Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22.400.000	22.400.000	100,00
	Belanja Jasa	10.000.000	10.000.000	100,00
	Belanja Jasa Kantor	10.000.000	10.000.000	100,00
	a. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat tim	10.000.000	10.000.000	100,00

	Pelaksana Kegiatan			
	Belanja Perjalanan Dinas	6.225.000	2.625.000	42,17
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.225.000	2.625.000	42,17
	a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam .. Kota	6.225.000	2.625.000	42,17
		<b>43.852.000</b>	<b>40.199.500</b>	<b>91,67</b>

Tabel 4.8

Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan  
Kecamatan Padamara  
Sub Kegiatan Sinergitas Dengan Kepolisian RI, TNI dan  
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

No	Uraian	Pagu APBD	Realisasi	
			(Rp)	%
1	<b>Belanja Operasi</b>	<b>21.380.000</b>	<b>21.020.000</b>	<b>98,32</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>21.380.000</b>	<b>21.020.000</b>	<b>98,32</b>
	Belanja Barang	2.880.000	2.520.000	87,50
	Belanja Barang Pakai Habis	2.880.000	2.520.000	87,50
	a. Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.880.000	2.520.000	87,50
	Belanja Jasa	18.500.000	18.500.000	100,00
	Belanja Jasa Kantor	18.500.000	18.500.000	100,00
	a. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	18.500.000	18.500.000	100,00
		<b>21.380.000</b>	<b>21.020.000</b>	<b>98,32</b>

Tabel 4.9

Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan  
Kecamatan Padamara  
Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama  
dan Tokoh Masyarakat

No	Uraian	Pagu APBD	Realisasi	
			(Rp)	%
1	<b>Belanja Operasi</b>	<b>7.850.000</b>	<b>7.833.180</b>	<b>99,79</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>7.850.000</b>	<b>7.833.180</b>	<b>99,79</b>
	Belanja Barang	7.850.000	7.833.180	99,79
	Belanja Barang Pakai Habis	7.850.000	7.833.180	99,79
	a. Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamut	7.850.000	7.833.180	99,79
		<b>7.850.000</b>	<b>7.833.180</b>	<b>99,79</b>

Tabel 5.0  
 Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan  
 Kecamatan Padamara  
 Sub Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa

No	Uraian	Pagu APBD	Realisasi	
			(Rp)	%
1	<b>Belanja Operasi</b>	<b>23.356.000</b>	<b>22.055.300</b>	<b>94,43</b>
	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>5.700.000</b>	<b>4.700.000</b>	<b>82,46</b>
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	5.700.000	4.700.000	82,46
	Belanja Honorarium	5.700.000	4.700.000	82,46
	a. Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	5.700.000	4.700.000	82,46
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>17.656.000</b>	<b>17.355.300</b>	<b>98,30</b>
	Belanja Barang	14.856.000	14.555.300	97,98
	Belanja Barang Pakai Habis	14.856.000	14.555.300	97,98
	a. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	1.941.000	1.941.000	100,00
	b. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	2.100.000	2.100.000	100,00
	c. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	1.000.000	923.300	92,33
	d. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos	90.000	90.000	100,00
	e. Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.500.000	3.500.000	100,00
	f. Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	6.225.000	6.001.000	96,40
	Belanja Jasa	2.800.000	2.800.000	100,00
	Belanja Jasa Kantor	800.000	800.000	100,00
	a. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	800.000	800.000	100,00
	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.000.000	2.000.000	100,00
	a. Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.000.000	2.000.000	100,00
		<b>23.356.000</b>	<b>22.055.300</b>	<b>94,43</b>

Tabel 5.1

Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan  
Kecamatan Padamara  
Sub Kegiatan Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan  
Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi vertikal

No	Uraian	Pagu APBD	Realisasi	
			(Rp)	%
1	<b>Belanja Operasi</b>	<b>29.910.500</b>	<b>29.910.000</b>	<b>100,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>29.910.500</b>	<b>29.910.000</b>	<b>100,00</b>
	Belanja Barang	3.210.5000	3.210.000	99,98
	Belanja Barang Pakai Habis	3.210.5000	3.210.000	99,98
	a. Belanja Bahan-Bahan Lainnya	3.210.5000	3.210.000	99,98
	Belanja Jasa	26.700.000	26.700.000	100,00
	Belanja Jasa Kantor	26.700.000	26.700.000	100,00
	a. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	26.700.000	26.700.000	100,00
		<b>29.910.500</b>	<b>29.910.000</b>	<b>100,00</b>

Adapun Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD Kecamatan Padamara meliputi :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kabupaten

1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

a) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Realisasi pelaksanaan sub kegiatan dimaksud yaitu tersusunnya dokumen renstra dan renja, meliputi : alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover dan belanja makanan dan minuman rapat. Alokasi anggaran sebesar Rp. 396.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 135.000,00 (34,09%).

Tidak ada permasalahan dalam Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Solusi : tidak ada

b) Sub Kegiatan Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Realisasi pelaksanaan sub kegiatan dimaksud yaitu jumlah dokumen evaluasi yang disusun yaitu 2 dokumen, meliputi :

belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor, dan belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover.

Alokasi anggaran sebesar Rp. 1.908.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.908.000,00 (100,00%).

Tidak ada permasalahan dalam Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Solusi : tidak ada.

2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

a) Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Realisasi pelaksanaan sub kegiatan dimaksud yaitu jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayar tepat waktu sebanyak 22 ASN, meliputi : belanja gaji pokok PNS, belanja tunjangan keluarga PNS, belanja tunjangan jabatan PNS, belanja tunjangan fungsional umum PNS, belanja tunjangan beras PNS, belanja tunjangan PPH/tunjangan khusus PNS, belanja pembulatan gaji PNS, belanja iuran jaminan kesehatan PNS, belanja iuran jaminan kecelakaan kerja PNS, belanja iuran jaminan kematian PNS, belanja iuran simpanan Tapera PNS, tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS, dan tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja PNS.

Alokasi anggaran sebesar Rp. 2.111.133,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.939.351.648 (91,87%).

Tidak ada permasalahan dalam Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

Solusi : tidak ada.

b) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Realisasi pelaksanaan sub kegiatan dimaksud yaitu jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan/ sspd dalam dan luar daerah sebanyak 20 kali meliputi : belanja perjalanan dinas biasa.

Alokasi anggaran sebesar Rp. 1.770.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.540.000,00 (87,01%).

Tidak ada permasalahan dalam Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.

Solusi : tidak ada.

c) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Realisasi pelaksanaan sub kegiatan dimaksud yaitu tersedianya honor pengelola keuangan, pejabat pengadaan, pemeriksa hasil pekerjaan untuk 12 orang, meliputi : belanja honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan, belanja jasa pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan pendapatan, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover, honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan, dan belanja jasa tenaga operator komputer.

Alokasi anggaran sebesar Rp. 82.762.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 81.362.000,00 (98,31%).

Tidak ada permasalahan dalam Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.

Solusi : tidak ada.

d) Sub kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Realisasi pelaksanaan sub kegiatan dimaksud yaitu tersusunnya SPM, LRA, dan laporan keuangan, spj, meliputi : belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer, dan belanja jasa tenaga operator komputer.

Alokasi anggaran sebesar Rp. 20.220.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 19.884.000,00 (98,34%).

Tidak ada permasalahan dalam Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.

Solusi : tidak ada.

3) Kegiatan Program Administrasi Umum

a) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu tersedianya perlengkapan listrik meliputi selama 12 bulan, meliputi : belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat listrik.

Alokasi anggaran sebesar Rp. 1.735.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.734.600,00 (99,98%).

Tidak ada permasalahan dalam Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

Solusi : tidak ada.

b) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Realisasi pelaksanaan sub kegiatan dimaksud yaitu tersedianya peralatan rumah tangga meliputi : belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya.

Alokasi anggaran sebesar Rp. 800.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 800.000,00 (100,00%).

Tidak ada permasalahan dalam Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Solusi : tidak ada.

c) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Realisasi pelaksanaan sub kegiatan dimaksud yaitu tersedianya bahan logistik kantor meliputi : belanja bahan-bahan bakar dan pelumas, belanja bahan-isi tabung gas, belanja bahan-bahan lainnya, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perabot kantor, dan belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-souvenir/cenderamata. Alokasi anggaran sebesar Rp. 49.510.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 49.431.000,00 (99,84%).

Tidak ada permasalahan dalam Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.

Solusi : tidak ada.

d) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Realisasi pelaksanaan sub kegiatan dimaksud yaitu tersedianya jasa cetak dan penggandaan, meliputi : belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor.

Alokasi anggaran sebesar Rp. 5.587.500,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.583.600,00 (99,93%).

Tidak ada permasalahan dalam Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Solusi : tidak ada.



e) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Realisasi pelaksanaan sub kegiatan dimaksud yaitu tersedianya surat kabar dan majalah meliputi : belanja langganan jurnal/surat kabar/majalah.

Alokasi anggaran sebesar Rp. 1.060.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.060.000,00 (100,00%).

Tidak ada permasalahan dalam Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.

Solusi : tidak ada.

f) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu tersedianya alat tulis kantor, meliputi : belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer, dan belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perabot kantor.

Alokasi anggaran sebesar Rp. 10.409.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 10.409.000,00 (100,00%).

Tidak ada permasalahan dalam Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material.

Solusi : tidak ada.

g) Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Realisasi pelaksanaan sub kegiatan dimaksud yaitu tersedianya jamuan rapat, meliputi : belanja honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan, belanja natura dan pakan-natura, belanja makanan dan minuman rapat, dan belanja makanan dan minuman jamuan tamu.

Alokasi anggaran sebesar Rp. 17.880.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 17.878.500,00 (99,99%).

Tidak ada permasalahan dalam Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

Solusi : tidak ada.

- 4) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- a) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  
Realisasi pelaksanaan sub kegiatan dimaksud yaitu Tersedianya peralatan dan mesin lainnya, meliputi : belanja modal kursi kerja pejabat, dan belanja modal komputer unit lainnya.  
Alokasi anggaran sebesar Rp. 20.600.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 20.600.000,00 (100,00%).  
Tidak ada permasalahan dalam Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.  
Solusi : tidak ada.
- b) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya  
Realisasi pelaksanaan sub kegiatan dimaksud yaitu tersedianya gedung kantor atau bangunan lainnya, meliputi : Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor.  
Alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 99.290.000,00 (99,29%).  
Tidak ada permasalahan dalam Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.  
Solusi : tidak ada.
- 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  
Realisasi pelaksanaan sub kegiatan dimaksud yaitu tersedianya perangko, materai, jasa pos dan jasa pengiriman, meliputi : belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-benda pos.  
Alokasi anggaran sebesar Rp. 330.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 330.000,00 (100,00%).  
Tidak ada permasalahan dalam Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.  
Solusi : tidak ada
- b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  
Realisasi pelaksanaan sub kegiatan dimaksud yaitu tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, meliputi : belanja

tagihan telepon, belanja tagihan air, belanja tagihan listrik, dan belanja tagihan kawat/faksimile/internet/TV berlangganan.

Alokasi anggaran sebesar Rp. 19.920.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 16.180.091,00 (81,23%).

Tidak ada permasalahan dalam Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

Solusi : tidak ada.

c) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Realisasi pelaksanaan sub kegiatan dimaksud yaitu terpeliharanya peralatan kantor, meliputi : belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak.

Alokasi anggaran sebesar Rp. 815.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 810.000,00 (99,39%).

Tidak ada permasalahan dalam Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

Solusi : tidak ada.

d) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Realisasi pelaksanaan sub kegiatan dimaksud yaitu tersedianya jasa pelayanan umum kantor, meliputi : belanja jasa tenaga kebersihan, dan belanja jasa tenaga keamanan..

Alokasi anggaran sebesar Rp. 54.528.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 53.200.000,00 (97,56%).

Tidak ada permasalahan dalam Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

Solusi : tidak ada.

6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

Realisasi pelaksanaan sub kegiatan dimaksud yaitu tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas/lapangan dan jasa pengemudi, meliputi : belanja bahan-bahan bakar dan pelumas, belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan, dan belanja pemeliharaan

alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor roda dua.

Alokasi anggaran sebesar Rp. 21.620.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 18.717.390,00 (86,57%).

Tidak ada permasalahan dalam Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan.

Solusi : tidak ada.

b) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Realisasi pelaksanaan sub kegiatan dimaksud yaitu terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya, meliputi : belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat kantor lainnya, dan belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pendingin.

Alokasi anggaran sebesar Rp. 4.300.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.230.000,00 (98,37%).

Tidak ada permasalahan dalam Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

Solusi : tidak ada.

c) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Realisasi pelaksanaan sub kegiatan dimaksud yaitu terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya, meliputi : Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor.

Alokasi anggaran sebesar Rp. 150.000.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 149.241.000,00 (99,49%).

Tidak ada permasalahan dalam Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Solusi : tidak ada.

b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

1) Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

a) Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan.

Realisasi pelaksanaan sub kegiatan dimaksud jumlah fasilitasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa meliputi : . belanja

alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-benda pos, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer, belanja makanan dan minuman rapat, dan belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota.

Alokasi anggaran sebesar Rp. 30.225.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 19.180.000,00 (63,46%).

Tidak ada permasalahan dalam Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan.

Solusi : tidak ada.

2) Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat

a) Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan.

Realisasi pelaksanaan sub kegiatan dimaksud yaitu Jumlah laporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan meliputi : . belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor,dan belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover..

Alokasi anggaran sebesar Rp. 666.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 540.000,00 (81,08%).

Tidak ada permasalahan dalam Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan.

Solusi : tidak ada.

c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

1) Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

a) Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa.

Realisasi pelaksanaan sub kegiatan dimaksud yaitu jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan musrenbangdes/muskel tepat waktu, meliputi : belanja honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor, dan belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-benda pos, belanja

alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer, belanja makanan dan minuman rapat, belanja makanan dan minuman jamuan tamu, honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia, dan belanja perjalanan dinas dalam kota.

Alokasi anggaran sebesar Rp. 45.538.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 32.625.300,00 (71,64%).

Tidak ada permasalahan dalam Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa .

Solusi : tidak ada.

b) Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Realisasi pelaksanaan sub kegiatan dimaksud jumlah kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi, meliputi : belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor, dan belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-benda pos, belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat, belanja makanan dan minuman rapat, honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat pelaksana kegiatan, dan belanja perjalanan dinas dalam kota.

Alokasi anggaran sebesar Rp. 43.852.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 40.199.500,00 (91,67%).

Tidak ada permasalahan dalam Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

Solusi : tidak ada.

d. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

1) Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

a) Sub Kegiatan Sinergitas Dengan Kepolisian RI, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

Realisasi pelaksanaan sub kegiatan dimaksud yaitu jumlah kegiatan sinergitas oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan, meliputi : belanja makanan dan minuman rapat, dan honorarium

narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia.

Alokasi anggaran sebesar Rp. 21.380.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 21.020.000,00 (98,32%).

Tidak ada permasalahan dalam Sub Kegiatan Sinergitas Dengan Kepolisian RI, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan..

Solusi : tidak ada.

- b) Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.

Realisasi pelaksanaan sub kegiatan dimaksud jumlah kegiatan bersama tokoh agama/tokoh masyarakat, meliputi : belanja makanan dan minuman jamuan tamu.

Alokasi anggaran sebesar Rp. 7.850.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 7.833.180,00 (99,79%).

Tidak ada permasalahan dalam Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.

Solusi : tidak ada.

- e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

- 1) Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

- a) Sub Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Realisasi pelaksanaan sub kegiatan dimaksud yaitu Jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, meliputi : honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor, dan belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-benda pos,, belanja makanan dan minuman rapat, belanja makanan dan minuman jamuan tamu, honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia, dan belanja sewa alat rumah tangga lainnya (home use).

Alokasi anggaran sebesar Rp. 23.356.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 22.055.300,00 (94,43%).

Tidak ada permasalahan dalam Sub Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa..

Solusi : tidak ada.

- b) Sub Kegiatan Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi vertikal

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu terfasilitasinya penanganan pandemi covid-19 di kecamatan, meliputi : belanja bahan-bahan lainnya, dan honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan.

Alokasi anggaran sebesar Rp. 29.910.500,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 29.910.000,00 (100,00%).

Tidak ada permasalahan dalam Sub Kegiatan Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi vertikal..

Solusi : tidak ada.

### **3. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja**

Perjanjian Kinerja Kecamatan Padamara Tahun 2021 yang telah ditetapkan mengacu pada dokumen Rencana Strategis Kecamatan Tahun 2021-2026 merupakan kesepakatan antara pihak/pejabat yang menerima tugas dan tanggungjawab kinerja dengan pihak/pejabat yang memberikan tugas dan tanggungjawab kinerja secara berjenjang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Perjanjian kinerja ini menjabarkan target kinerja yang merepresentasikan nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja, baik tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan patokan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Dengan demikian, Perjanjian kinerja Kecamatan Padamara pada dasarnya adalah komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Dari tabel 2.3 diketahui bahwa untuk mencapai sasaran, OPD Kecamatan Padamara akan melaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kabupaten, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagaimana yang



telah ditetapkan pada Kebijakan Pelaksanaan APBD Tahun 2021 termasuk Kebijakan Pelaksanaan Perubahan APBD Tahun 2021.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kabupaten, dilaksanakan melalui Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dilaksanakan melalui Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dan Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat.

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dilaksanakan melalui Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dilaksanakan melalui Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dilaksanakan melalui Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah.

Adapun target dan realisasi capaian kinerja program dan kegiatan OPD Kecamatan Padamara Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No	Uraian Program/Kegiatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kabupaten	2.677.283.500	2.493.855.829	93,15
	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.304.000	2.043.000	88,67
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.215.885.000	2.042.317.648	92,17
	3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	86.981.500	86.896.700	99,90
	4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	120.600.000	119.890.000	99,41

	Pemerintah Daerah			
	5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75.593.000	70.520.091	93,29
	6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	175.920.000	172.188.390	97,88
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	30.891.000	19.720.000	63,84
	1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	30.225.000	19.180.000	63,46
	2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	666.000	540.000	81,08
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	89.390.000	72.824.800	81,47
	1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	89.390.000	72.824.800	81,47
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	29.230.000	28.853.180	98,71
	1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	29.230.000	28.853.180	98,71
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	53.266.500	51.965.300	97,56
	1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	53.266.500	51.965.300	97,56

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa semua progam dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan perjanjian kinerja OPD Kecamatan Padamara Tahun 2021.

## **B. Kebijakan Strategis**

Pelaksanaan program dan kegiatan di OPD Kecamatan Padamara untuk Tahun Anggaran 2021 dapat dikatakan berhasil hal ini dapat dilihat dari aspek akuntabilitas keuangan pada tabel di atas. Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan OPD Kecamatan Padamara Tahun 2021 sebesar Rp.2.880.061.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 2.667.219.109,00 atau 92,61 %.

Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak Maret 2020 telah mempengaruhi segala aspek kehidupan dan memberikan dampak negatif. Tidak hanya sektor kesehatan saja yang terganggu, namun juga sektor lainnya seperti ekonomi, pertanian, sosial dan transportasi. Sepanjang 2021 Indonesia mengalami berbagai dinamika dan tantangan dalam penanganan Covid-19, diawali dengan lonjakan kasus pada Januari, diikuti lonjakan kedua pada Juli 2021.

Upaya pencegahan dan penanganan Pandemi Covid 19 di Kabupaten Purbalingga telah ditetapkan dengan berbagai kebijakan strategis yang tepat dan terukur berdasarkan petunjuk Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Bedasarkan kebijakan strategis yang telah di tetapkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Purbalingga maka dalam upaya pencegahan dan penanganan pandemic Covid 19, Kecamatan Padamara telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Melaksanakan rapat-rapat koordinasi bersama forkompimcam, kepala desa dan unsur terkait dalam upaya penanganan Covid-19 ditingkat Kecamatan.
2. Melaksanakan Operasi Penertiban Penggunaan Masker bersama unsur TNI-Polri-Satpol PP di wilayah Kecamatan Padamara
3. Melaksanakan Penyemprotan disinfektan pada fasiliats umum bekerja sama dengan Satgas Covi-19 tingkat Kabupaten dan instansi terkait
4. Mendampingi Tenaga Medis melaksanakan Tracking dan Test Swab bagi warga masyarakat yang kontak erat dengan pasien Positif Covid-19
5. Menindaklanjuti berbagai aturan dan protokol/panduan kesehatan, meliputi pelayanan publik, protokol kegiatan social, keagamaan, hajatan, protokol kegiatan ibadah, protokol pasar desa, protokol kegiatan padat karya tunai desa, serta protokol tempat wisata
6. Melaksanakan monitoring dan pendampingan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di wilayah Kecamatan Padamara

7. Mengkoordinasikan Pemerintah Desa untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
- a. Mengkoordinir Perangkat Desa, RW, RT serta memantau kondisi warga masyarakat dan apabila ada warga yang terindikasi Covid-19 melaporkan kepada UPTD Puskesmas Padamara untuk segera ditangani
  - b. Memantau warga masyarakat yang baru pulang bepergian dari luar negeri / luar daerah dan membawa yang bersangkutan untuk memeriksakan diri ke UPTD Puskesmas Padamara
  - c. Selalu mensosialisasikan pentingnya pencegahan COVID 19 sesuai Protokol Kesehatan;
    - melaksanakan penyemprotan disinfektan sebelum dan sesudah kegiatan
    - melakukan pengecekan suhu tubuh,
    - menyediakan sabun cuci tangan / hand sanitizer,
    - mewajibkan pemakaian masker.
  - d. Menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan waspada serta melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
  - e. Penetapan protokol pelayanan publik, protokol kegiatan sosial-keagamaan-hajatan, protokol kegiatan ibadah, protokol pasar desa, protokol kegiatan padat karya tunai desa, serta protokol tempat wisata.
  - f. Memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada warga masyarakat untuk tidak ragu menjalani vaksin

## **BAB IV**

### **CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN**

#### **A. Urusan Pemerintahan yang Menjadi Tugas Pembantuan**

##### **1. Tugas Pembantuan yang Diterima**

OPD Kecamatan Padamara tidak menerima tugas pembantuan.

##### **2. Tugas Pembantuan yang Diberikan**

OPD Kecamatan Padamara tidak memberikan tugas pembantuan.

#### **B. Hambatan/Permasalahan Dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian**

Tidak ada permasalahan. Tidak ada upaya penyelesaian.

**BAB V**  
**PENUTUP**

Demikian Laporan Pertanggungjawaban OPD Kecamatan Padamara Tahun 2021, mudah-mudahan dapat memberikan gambaran secara menyeluruh tentang penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi OPD Kecamatan Padamara selama satu tahun anggaran, dan semoga dapat dijadikan bahan masukan serta pertimbangan dalam menentukan kebijakan dan penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi OPD pada tahun berikutnya.

Padamara, 31 Desember 2021

CAMAT PADAMARA



**SARNO, SIP**

Pembina

NIP 19650622 199012 1 001